

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu cara penulis menyusun penelitian baru untuk mencari perbandingan yang selanjutnya akan ditemukannya inspirasi baru. Pada penelitian sebelumnya yang akan menjadi referensi oleh penelitian sebelumnya dalam penelitian ini adalah:

1. Armel R, Nasir A, Safitri D (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Armel R, Nasir A, Safitri D 2017) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Daerah Kota Dumai). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pada Daerah Kota Dumai. Pemanfaatan teknologi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kota Dumai. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pada Kota Dumai.

Terdapat adanya persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada :

- a. Persamaan pada variabel dependen yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan kompetensi SDM.
- c. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah.
- d. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan sistem pengendalian internal.

Terdapat pada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

- a. Penggunaan penelitian terdahulu yaitu pemanfaatan teknologi akuntansi sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan penelitian tersebut.
- b. Lokasi penelitian terdahulu yaitu Daerah Kota Dumai sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.
- c. Populasi penelitian terdahulu adalah memberikan kuisisioner kepada 33 SKPD, dengan masing-masing 3 responden setiap SKPD, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban dan sampel yang berjumlah 34.

2. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)

Penelitian yang digunakan oleh (Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati 2014) berjudul “Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan daerah pada SKPD kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan daerah pada SKPD kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Daerah Kabupaten Buleleng.

Terdapat adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Persamaan variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan variabel independen menggunakan penerapan SDM.
- c. Persamaan variabel independen menggunakan penerapan standar akuntansi.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Penelitian terdahulu tidak hanya menggunakan 3 variabel dependen sedangkan penelitian sekarang menggunakan 4 variabel dependen dimana variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adalah sistem pengendalian internal.
- b. Tempat penelitian terdahulu pada SKPD Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.
- c. Populasi dalam penelitian terdahulu adalah pegawai badan akuntansi atau penatausahaan keuangan di SKPD dimana jumlah sampel yang digunakan 28, sedangkan peneliti sekarang menggunakan bagian keuangan yang berjumlah 34 responden.

3. Hartono, Ramdany (2020)

Peneliti yang digunakan oleh (Hartono & Ramdany, 2020) yang berjudul “Pengaruh SAP, pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terdapat adanya persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Persamaan variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan variabel independen menggunakan sistem akuntansi pemerintah.
- c. Persamaan variabel independen menggunakan pengendalian internal.
- d. Persamaan variabel independen menggunakan kompetensi sumber daya manusia.

Terdapat adanya perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

- a. Penggunaan variabel independen pada penelitian terdahulu adalah 3, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 4 dimana variabel pembedanya adalah Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan populasi dalam penelitian seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 411 sakter, respon untuk masing-masing sakter adalah sebanyak 3 orang. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan populasi pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban yang berjumlah 34 responden.
- c. Lokasi penelitian terdahulu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.

4. **Kartika Dwi Indryani (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh (Kartika Dwi Indrayani, 2020) yang memiliki judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan dengan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Persamaan pada variabel dependen yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.
- c. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan kompetensi SDM.
- d. Persamaan pada variabel independen SPI.

Terdapat perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Populasi penelitian terdahulu menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten sebanyak 88 kuisioner, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban sebanyak 34 responden.
- b. Lokasi penelitian terdahulu di SKPD pada Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.

5. Gusti Ayu Krisna Dewi, Putu Eka Dianita Maryilianti Dewi (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh (Krisna Dewi Gusti Ayu & Eka, 2020) yang memiliki judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah Provinsi Bali”. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Provinsi Bali.

Terdapat adanya persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Persamaan variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan.
2. Persamaan pada variabel independen yang menggunakan sumber daya manusia.

3. Persamaan pada variabel independen yang menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah.
4. Persamaan pada variabel independen yang menggunakan SPI.

Terdapat adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Penelitian variabel independen terdahulu menggunakan 3 variabel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 4 variabel, dimana variabel dependen pada penelitian terdahulu yang tidak ada yaitu standar akuntansi pemerintahan.
2. Populasi sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 156 responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 34 responden.
3. Perbedaan lokasi penelitian terdahulu pada pemerintahan Provinsi Bali, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.

6. Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari 2019) berjudul “ Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi informasi, dan Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten”. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui pengaruh SDM, sistem pengendalian intern, TI dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa SDM, Sistem pengendalian intern, dan pemahaman basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat adanya persamaan pada penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu:

1. Persamaan pada variabel dependen yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan.
2. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan sumber daya manusia.
3. Persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan SPI.

Terdapat adanya perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 4 variabel independen.
2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pemahaman basis akrual, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
3. Populasi penelitian terdahulu menggunakan 90 responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 34 responden.
4. Perbedaan lokasi penelitian terdahulu pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Aset dan Daerah pada Kabupaten Tuban.

7. Yana Marisa, Defrizal, Hendri Dunan (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh (Yana Marisa, Defrizal, Hendri Dunan 2020) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintaham dan pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia , penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akundansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Persamaan variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan.
2. Persamaan varibel independen yang menggunakan kompetensi sumber daya manusia.
3. Kesamaan variabel independen yang menggunkana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Kesamaan varibel independen yang menggunkan penerapan SAP.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Pemanfaatan Teknologi Infomasi, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
2. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan responden yang merupakan pengelola keuangan pada Badan Layanan Umum sebanyak 40 responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 34 responden pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.
3. Perbedaan lokasi pada penelitian terdahulu pada Badan Layanan Umum, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah di Kabupaten Tuban.

8. Istiqomah Shinta Philadhelpia, Sri Suryaningsum, Sriyono (2020)

Penelitian yang dilakukan (Istiqomah Shinta Philadhelpia, Sri Suryaningrum, Sriyono., 2020) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Goverance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good goverance dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel standar akuntansi pemeritahan, dan good goverance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Kesamaan variabel dependen yang menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kesamaan variabel independen yang menggunakan kompetensi sumber daya manusia.
3. Kesamaan variabel independen yang menggunakan standar akuntansi pemerintah.
4. Kesamaan variabel independen yang menggunakan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu good goverance, sedangkan peneitian sekarang tidak menggunakan penelitan independen tersebut.
2. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan 95 responden pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian

sekarang menggunakan 34 responden pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah pada Kabupaten Tuban.

3. Perbedaan lokasi penelitian terdahulu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian sekarang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah pada Kabupaten Tuban.

9. Ni Made Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung Ulupi, I G.A. Budiasih (2015)

Penelitian dari (Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung, Budiasih 2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian dari kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu:

1. Kesamaan pada variabel independen yang menggunakan kualitas laporan keuangan.
2. Kesamaan pada variabel dependen yang menggunakan kompetensi sumber daya manusia.

3. Kesamaan pada variabel dependen yang menggunakan sistem pengendalian internal.
4. Kesamaan pada variabel dependen yang menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 4 variabel independen, dimana variabel pembedanya ada pada sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Populasi pada penelitian terdahulu ada 39 responden pada seluruh Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 34 responden pada seluruh pekerja BPPKAD di Kabupaten Tuban.
3. Perbedaan lokasi penelitian terdahulu pada SKPD Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sekarang pada BPPKAD Kabupaten Tuban.

10. M Azlan, Titiek Herawati, Endar Putriningsih (2015)

Penelitian dari (M Azlan, Titiek Herawati, Endar Putriningsih 2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Laporan Keuangan”. Tujuan peneliti ini adalah mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian internal sebagai variabel moderating.

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Kesamaan variabel dependen yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan daerah.
2. Kesamaan variabel independen yaitu menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen peran audit internal, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan penelitian independen tersebut.
2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS di SKPD Pemprov ITB. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden yang terlibat sebagai pegawai PPK.
3. Lokasi pada penelitian terdahulu di ITB, sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Tuban.

11. Enwati (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh (Enwati, 2013) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah (SIAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada kota bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu:

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan
2. Kesaaman penggunaan dua variabel independen yang sama yaitu sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Peneliti terdahulu menggunakan dua variabel independen, sedangkan peneliti sekarang menggunakan empat variabel independen.
2. Populasi dalam peneliti ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan sasaran penelitiannya adalah pegawai yang bekerja dibagian Sub. Bagian Keuangan dan Program, Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan, Akuntansi Belanja dan Pечатatan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan jumlah sampel 28 orang.

3. Perbedaan pada lokasi penelitian terdahulu pada Kota Bandung sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Tuban.

12. Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani 2020)“ dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat persamaan pada peneliti/an terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Kesamaan pada variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan
2. Kesamaan pada variabel independen yang digunkana adalah kompetensi sumber daya manusia.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu pemanfaatan teknolgi informasi, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

2. Sampel pada peneliti terdahulu adalah karyawan/karyawati dan karyawan pengguna teknologi informasi di tiga bank syariah situbondo, yang berjumlah 99 orang, sedangkan penelitian sekarang adalah BPKAD Tuban yang berjumlah 34 responden.
3. Perbedaan lokasi pada penelitian terdahulu di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi, sedangkan penelitian sekarang pada kantor BPKAD Kabupaten Tuban.

13. Putri Pujanira (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri Pujanira 2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY.

Hasil penelitian dari penelitian kompetensi daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Kesamaan menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.
2. Kesamaan menggunakan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia.

3. Kesamaan menggunakan variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah.
4. Kesamaan menggunakan variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Penelitian sekarang menggunakan variabel independe sistem pengendalian internal, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen tersebut.
2. Sampel penelitian terdahulu adalah 15 Dinas-dinas Daerah Pemerintah Daerah DIY, dengan mengumpulkan kuisioner 120 responden.
3. Perbedaan lokasi pada penelitian terdahulu pada Daerah Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Tuban.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITIAN DAN TAHUN	Variabel Independen				Variabel Dependen
		Penerapan standar akuntansi pemerintahan	Sistem pengendalian internal	Sistem akuntansi keuangan daerah	Kompetensi Sumber daya manusia	
1.	Armel R, Nasir A, Safitri D (2017)	B	B		B	Kualitas Laporan Keuangan
2.	Kadek D, Nyoman T, Sinarwati (2014)	B		B	B	
3.	Hartono, Ramdany (2020)	B	B		B	
4.	Kartika Dwi I (2020)		B	TB	B	
5.	Gusti Ayu, Putu Eka Dianita (2020)		B	B	B	
6.	Melati R, Ayu Noorida, Windu (2019)		B		B	
7.	Yana Marisa, Defrizal, Hendri (2020)		B		B	
8.	Istiqomah S, Sri S, Sriyono (2020)	B	TB		TB	
9.	Ni Made, Gusti Ketut, Budiasih (2015)	B	B		B	
10.	M. Azlan (2016)	TB				
11.	Enwati (2013)			B	B	
12.	Nabila Z, Dwi C, Astrid M (2019)				B	
13.	Putri Pujanira (2017)	B		B	B	

2.2 Landasan Teori

Pada bagian landasan teori akan menjelaskan dan mengutipkan teori yang berhubungan pada penelitian ini.

2.2.1 *Decision-Usefulness Theory*

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertai dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di *University of Chicago Amerika Serikat* oleh George J. Staubus (Staubus, 2000). Teori ini didasarkan pada permasalahan yang timbul berkenaan dengan konsep akuntansi yang berdasarkan biaya historis, bahwa konsep biaya historis tidak relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan nilai sekarang terhadap wajar mencakup syarat kualitas informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang akan digunakan (Staubus, 2000).

Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) adalah Chambers. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan telah dijadikan referensi penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards FASB yang berlaku di Amerika Serikat. Dasar dari teori ini adalah atas masalah yang timbul pada konsep biaya historis yang tidak benar untuk digunakan penelitian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan terhadap nilai sekarang terhadap harga wajar. Relevan yang dimaksudkan yaitu mengacu pada prediksi tingkat kembalian di masa depan bagi investor. Suatu property financial adalah relevan bagi suatu keputusan bila memberikan materialitas yang cukup, hal itu berarti memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi keputusan. FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Agar relevan, informasi harus memiliki sifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. Pernyataan dari FASB bahwa untuk menjadi relevan bagi investor, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Dengan adanya hal tersebut bisa lebih membantu untuk pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lampau, sekarang dan yang akan datang.

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi yang memiliki komponen di dalamnya perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi. Tujuan dari pada teori kegunaan-keputusan ini untuk menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Tujuan akuntansi juga dikaitkan dengan stakeholder yaitu informasi keuangan yang disediakan organisasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Pada kegunaan-keputusan terlihat ringkasan yang mengacu pada kriteria pilihan akuntansi dan pendekatan pembuktian dalam pengukuran asset dan liabilitas.

Informasi akuntansi menyimpulkan bahwa pendekatan kegunaan-keputusan dipakai untuk menguji apakah pengumuman atas beberapa kejadian dalam pasar modal dapat menghasilkan suatu perubahan sifat distribusi dan kembalian saham. (Menurut *SFAC* No. 1 tentang kinerja perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Tujuan khusus pelaporan keuangan adalah

pengukur efisiensi manajemen, meramalkan keadaan usaha dan distribusi modal dari periode ke periode dan pengukuran keberhasilan.

Sebaliknya, (W. R.Scott, 2003) mengatakan bahwa pendekatan kegunaan keputusan merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan yang berdasarkan biaya historis agar lebih berguna. Ada dua pendekatan penting pada pendekatan kegunaan keputusan, yaitu yang pertama siapa pengguna laporan keuangan dan kedua apakah ada masalah dalam keputusan laporan keuangan. Dengan adanya permasalahan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi pertanggung jawaban kepada pemilik dan memberikan informasi yang berguna bagi investor.

2.2.2 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Pada teori keagenan yang merupakan dasar dengan menggunakan pemahaman *corporate governance* dan *earning management*. Perspektif hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham yang digunakan untuk memahami hubungan antara keduanya. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan.

Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Teori Jensen dan Meckling (1976) ini merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya agensi dalam tiga jenis:

- 1) Biaya monitoring (*monitoring cost*), pengeluaran biaya yang digunakan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- 2) Biaya bonding (*bonding cost*), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal, atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan yang tepat.
- 3) Kerugian residual (*residual cost*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

Pengaplikasian teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antar pihak yang memberi wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of control*". Berdasarkan teori keagenan, terdapat 2 macam hubungan keagenan, yakni hubungan keagenan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat. Mengacu pada akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, transparansi melalui laporan keuangan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat.

Suatu cara untuk mengawasi sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya organisasi disebut pengendalian internal. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan *realible*. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP bertujuan memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 lampiran I menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internalnya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan.

2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah kondisi mengenai kinerja keuangan entitas tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Laporan Finansial (terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

SAP memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan, yang terdiri dari

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan
11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Realisasi APBD (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilitas) dan modal sendiri (owner equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi. Selain itu Laporan Arus Kas juga menampilkan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah)

Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas merupakan penilaian output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud maupun dari segi tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila bisa memenuhi beberapa syarat sesuai karakteristik yang ada pada PP No. 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada pada laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi memungkinkan pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
 - Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa lalu dan masa kini.
 - Tepat waktu. Informasi yang tepat waktu akan membantu dalam mengambil keputusan.
 - Lengkap. Informasi yang lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang baik dan benar akan membantu mengambil keputusan dengan memperhatikan

kendala yang ada. Permasalahan yang termuat dalam laporan keuangan dapat diungkap dengan jelas agar tidak ada kekeliruan dalam penggunaan informasi.

2. Andal

Informasi pada laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyusahkan ataupun menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu :

a. Penyajian Jujur.

Informasi yang jujur pada saat transaksi pada laporan keuangan serta peristiwa lainnya yang secara wajar dapat untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak berbeda maka hasilnya akan tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.

Informasi yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu ataupun pihak manapun.

3. Dapat Dibandingkan.

Informasi pada laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang bisa disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Komponen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan atau suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Rincian yang tertera dari angka dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip bagian akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Akuntansi Berbasis Akrua berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi

dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan keuangan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan antara lain:

1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
2. Mempelihatkan akuntabilitas pemerintahan atas penggunaan seluruh sumber daya.
3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintahan atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasusnya.
5. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
6. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

Jika dikaitkan dengan logika secara berfikir, maka laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.2.5 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pengendalian internal untuk mengurangi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut (Mulyadi, 2010:164) menyatakan bahwa terdapat tujuan pokok dari sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi

Apabila tidak dilindungi dengan pengendalian intern, kekayaan fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak tanpa sengaja.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Agar dapat menyelenggarakan usahanya dengan baik, manajemen harus mempunyai informasi akurat yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya yang tidak terkendali.

Peran sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Kemudian unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Sistem Pengendalian Intern memiliki fungsi yang sangat penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai system pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem formulir, dokumen dan

catatan, yang mana semua hal tersebut akan mengandung fungsi keuangan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik.

2.2.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut (Deddi Nordiawan, 2006:5) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah menurut (Abdul Halim, 2004) adalah:

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi yang dibawa pada era otonomi daerah.

2.2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu pekerjaan yang mampu melandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntun oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2011) Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Standar kompetensi mencakup tiga hal, yang disingkat dengan KSA yaitu: (1) pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis; (2) keterampilan (*skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit; (3) sikap (*attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Kompetensi SDM dengan demikian adalah seorang pegawai yang memiliki kemampuan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memengaruhi kinerjanya secara langsung untuk mencapai tujuan.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAP adalah akuntansi yang memiliki prinsip untuk diterapkannya kedalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Suatu pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jika pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik, berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hartono & Ramdany, 2020) dimana pengaruh penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksiian penggelapan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian internal terhadap laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum regulasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelegaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. (Melati Ramadhani, 2019), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

(Hall, 2004:151) mengungkapkan bahwa *“The quality of information generated by the accounting information system impact management’s ability to take action and make decisions in connection with the organization’s operations and to prepare reliable financial statements”*. Sedangkan (Mulyadi, 2001:19) mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mulyadi, 2001) bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan (Kadek Desiana Wati dkk, 2014) yang menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan M. Ali, dkk (2016)

menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah dibuat untuk menjamin siklus akuntansi bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala ataupun masalah, apabila terdapat masalah pada salah satu bagian dari sistem akuntansi keuangan tersebut maka bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai harus tersusun secara sistematis mulai dari awal pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar otomatis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

2.3.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

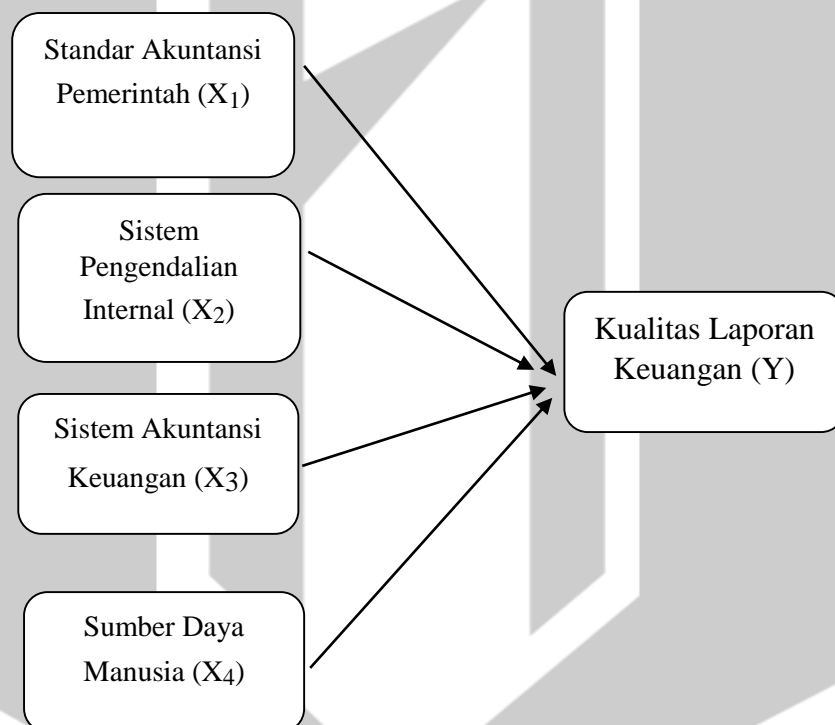
Kompetensi merupakan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, Kompetensi aparatur di Pemerintah Daerah yang berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparatur berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di bidangnya. Adanya kompetensi dibidang akuntansi akan meningkatkan nilai informasi dalam pelaporan keuangan Pemda.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi apabila dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien dan ekonomis. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi

karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas bisa diterapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM bagian penting yang bisa menghasilkan laporan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan (Azlan dkk., 2015) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran diatas terdapat ada empat variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena adanya prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sistem pengendalin internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena proses penyusunan laporan keuangan pada proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah harus mengawasi kinerja pemerintah melalui sistem pengendalian internal, supaya laporan yang dihasilkan tidak salah saji sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik, benar dan berkualitas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem ini sangat dibutuhkan untuk mengelola informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mampu memberikan *output* data berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena SDM mempunyai kompetensi baik dan bisa menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan ekonomis, oleh karenanya SDM mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, perumusan masalah, dan landasan teori diatas, maka hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

H₂ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

H₃ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

H₄ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan